



APBD 2021 Terserap 95,89 Persen

SUNGAI RAYA - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, penyerapan anggaran pada APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1,567 triliun lebih dan terserap sebesar 95,89 persen. Hal tersebut disampaikan Bupati saat memaparkan serapan anggaran dan capaian kinerja Pemkab Kubu Raya, di Ruang Rapat Bupati Kubu Raya, Senin (3/1).

"Ada peningkatan APBD dari tahun 2020 sebesar Rp1,511 triliun, dan jika dilihat dari porsi APBD tahun 2021 ada pendapatan terutama dari sisi pajak dan PAD yang kinerjanya melampaui target," kata Muda.

Bupati mengutarakan bahwa secara umum realisasi hasil pembangunan di Kubu Raya sepanjang 2021 lalu mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini, katanya, bisa dilihat dari beberapa sektor yang cakupan realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan.

Muda juga memaparkan realiasi belanja daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Hal tersebut, menurutnya, perlu disampaikan lantaran capaian kinerja pemerintah daerah juga diukur dari daya serap belanja daerah.

"Alhamdulillah Kubu Raya di tahun lalu dari total Rp1,567 triliun belanja daerahnya yang lalu, total 94, 61 persen. Dan tahun ini belanja daerahnya meningkat, menjadi Rp1,646 triliun. Dan daya serapnya Untuk kinerja serapan anggaran hingga 31 desember totalnya 95,89 persen," jelasnya.

Muda menerangkan dari sisi belanja daerah, tentu dilakukan secara terukur sesuai dengan kebutuhan di lapangan, baik yang menyangkut dengan belanja pegawai dan belanja publik. Menurutnya, beberapa sektor pembangunan *mandatory spending*-nya atau belanja pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang sebagian besar sudah melampaui target yang telah ditetapkan.

"Misalnya untuk di bidang

kesehatan ini *mandatory spending*-nya sebesar 10 persen dari total karakter daerah, artinya ini standar minimal yang diwajibkan minimal untuk bidang kesehatan itu 10 persen, namun di Kubu Raya sudah terealisasi sebesar 18 persen, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ungkapnya.

Terlampauinya *mandatory spending* untuk bidang kesehatan, lanjut Muda, salah satu satunya juga didukung adanya alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang dialokasikan sebesar Rp21 miliar pada 2021 lalu. Cukup besarnya alokasi PBI, kata Muda, menunjukkan kepedulian pemerintah untuk merealisasikan perlindungan kesehatan secara universal.

"Hingga saat ini cakupan layanan BPJS baik yang diang-

garkan dari PBI pusat dan PBI daerah mencapai 76 persen," jelasnya.

Untuk bidang pendidikan yang *mandatory spending*-nya sesuai dengan aturan sebesar 20 persen, namun di Kubu Raya, diakui Muda, terealisasi sebesar 29,61 persen. "Di bidang pendidikan *mandatory spending*-nya juga sudah melampaui standar minimal yang harus dialokasikan untuk bidang pendidikan. Dan ini kami harap ke depan secara tak langsung juga bisa berkontribusi untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kubu Raya," ungkapnya.

Kemudian infrastruktur, menurut dia, jika pada 2021, *mandatory spending*-nya baik untuk jalan, jembatan dan pengairan dan infrastruktur lainnya sekitar 25 persen paling minimal dari transfer daerah. "Alhamdulillah

Kubu Raya alokasikan untuk pembangunan infrastruktur sebesar 49 persen, dari total transfer daerah," jelasnya. "Ini menunjukkan komitmen Pemkab Kubu Raya sudah sesuai dengan arah regulasi Pemerintah Pusat, bahkan kita bisa memperbesar belanja infrastruktur, maupun pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial lainnya," kata Muda.

Dia menambahkan, dari penyerapan anggaran tersebut, total silva (dana yang tidak terserap) di Kubu Raya hanya Rp28 miliar. "Perlu diketahui, kita tidak bisa menyerap Rp28 miliar tersebut karena dana ini merupakan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi yang baru masuk saat mendekati batas akhir laporan yaitu tanggal 30 Desember, sehingga dana tersebut memang tidak bisa kita gunakan di tahun 2021.

Namun, dana ini akan kita gunakan untuk tahun 2022," kata Muda.

Di kesempatan yang sama Muda juga menyingsing mengenai upaya Pemerintah Pusat dalam program pemulihan ekonomi nasional, dan juga didukung penuh oleh Pemerintah Kubu Raya dalam mempercepat pemulihan ekonomi di daerah. "Kami dari pemerintah Kubu Raya juga sudah berusaha untuk menyusun program yang mengarah pada pemulihan ekonomi daerah dan totalnya alokasi yang dianggarkan untuk pemulihan ekonomi daerah tahun 2021 sekitar Rp37,139 miliar dan terserap 93,54 persen dari total yang telah dianggarkan. Tentu saja dengan dukungan yang kami lakukan ini secara tak langsung bida mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional," tutup Muda. (ash)